

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2019-2024**

Tri Ida Suryani¹, Hasanah Setyowati²

^{1,2}STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Email : Idatri7@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze: 1. The influence of Regional Original Revenue (PAD) on regional financial independence in 5 regencies/cities in the Special Region of Yogyakarta (DIY). 2. The influence of Balanced Funds on regional financial independence in 5 regencies/cities in DIY. 3. The simultaneous influence of PAD and Balanced Funds on regional financial independence in 5 regencies/cities in DIY. The sample used in this study includes all regencies/cities in the Special Region of Yogyakarta (DIY) that reported their Budget Realization Reports during the period from 2019 to 2024, resulting in 30 samples. The data analysis method used is quantitative data analysis with the SPSS 30 analysis tool. The results of the study indicate that there is a significant influence of Regional Original Revenue (PAD) on Regional Financial Independence in regencies/cities in DIY from 2019 to 2024. 2. There is no significant influence of Balance Funds on Regional Financial Independence in the Regencies/Cities of DIY from 2019 to 2024. 3. Simultaneously, there is a significant influence of Local Own-Source Revenue and Balance Funds on regional financial independence.

Keywords: *Local Own-Source Revenue, Balancing Funds, Regional Financial Independence.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis : 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah di 5 Kabupaten/Kota di DIY 2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di 5 Kabupaten/Kota di DIY. 3. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah di 5 Kabupaten/Kota di DIY. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup seluruh Kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang melaporkan Laporan Realisasi Anggaran selama periode 2019 sampai dengan 2024, sehingga didapatkan 30 sampel, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dengan alat analisis SPSS 30.

Dari hasil penelitian didapatkan 1. Adanya pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di DIY dari Tahun 2019-2024. 2. Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di DIY dari Tahun 2019-2024. 3. Secara Simultan adanya pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kemandirian Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia merupakan terobosan besar dalam tata kelola pemerintahan untuk lebih demokratis dan transparan. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak dimulainya otonomi daerah. Lahirnya kedua Undang-Undang ini diharapkan menjadi landasan percepatan pertumbuhan ekonomi antar-daerah dan akan menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah yang sebelumnya tersentralisasi menjadi desentralisasi. Undang-Undang tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Otonomi adalah kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah menjadikan daerah tersebut mandiri dalam segala hal kecuali untuk urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah namun tentunya tidak luput dari pengawasan dan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat. Desentralisasi adalah proses penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau organisasi yang lebih rendah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di daerah. Desentralisasi bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dengan prinsip otonomi.

Menurut Harefa (2018) ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonominya secara efektif, yaitu (1) besarnya kemampuan keuangan daerah, yang berarti kemampuan dan kewenangan pada sumber-sumber keuangan, mengelola, dan penggunaan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dapat digali, dan (2) berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat, di mana pendapatan asli daerah harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Adapun bentuk dana perimbangan ini berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Masing-masing dana tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda di mana pengaturannya tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat.

Berdasarkan pendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ketergantungan daerah pada TKDD masih begitu kuat. Ketergantungan APBD pada TKDD rata-rata nasional adalah 80,1%. Di sisi lain, kontribusi dari pendapatan asli daerah kurang lebih hanya 12,87%. Ketergantungan fiskal pada pusat bahkan semakin akut bagi pemerintah kota/kabupaten. Padahal, di tingkat kota/kabupaten, fokusnya adalah pada otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,

seperti yang dinyatakan pada UU No. 33 Tahun 2004 perihal perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Nugraha, 2019).

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan merupakan komponen sumber pendapatan daerah yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja keuangan dari sebuah daerah. PAD merupakan komponen utama sumber pendapatan yang berasal dari daerah, sedangkan dana perimbangan merupakan stimulus untuk mendorong kenaikan PAD tersebut.

Evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 melalui perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) untuk tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan menggunakan formula Hunter (1977) dan pengelompokan kemandirian fiskal daerah menggunakan klasifikasi yang disusun oleh Sampurna (2018) seperti ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

No.	Nilai IKF	<u>Kondisi Kemandirian Fiskal</u>
1	$0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$	Belum <u>Mandiri</u>
2	$0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$	<u>Menuju kemandirian</u>
3	$0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$	<u>Mandiri</u>
4	$0,75 \leq \text{IKF} \leq 1,00$	Sangat <u>mandiri</u>

Nilai IKF berkisar antara $0 \leq \text{IKF} \leq 1,00$ yang artinya jika angka IKF semakin mendekati 1 maka semakin sedikit sekali ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan dapat dikatakan daerah tersebut mampu membiayai pembiayaan daerahnya dan sebaliknya jika angka IKF semakin kecil artinya ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi. Berdasarkan hasil laporan BPK tersebut kabupaten/kota yang berada di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada rentang belum mandiri (Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo), sedangkan pada rentang menuju kemandirian berada pada kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Penelitian tentang kemandirian keuangan daerah sudah banyak dilakukan dengan variabel dan hasil yang bervariasi. Lusiana (2025) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Jambi dengan sampel tahun 2019-2023. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan di Kota Jambi memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pramesti I dan Titik M (2025) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum

Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur) Tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya DBH dan DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan dari dana transfer pusat, semakin rendah tingkat kemandirian daerah tersebut.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurliza & Halmawati (2020) mengenai PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Propinsi Riau belum dapat dikatakan daerah yang mandiri. Hal tersebut terjadi karena ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan dari Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemandirian Keuangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kinerja suatu daerah. Pos-pos pembentuk struktur APBD yang tertuang dalam LRA

yang dilaporkan setiap tahun menjadi dasar gambaran kemandirian daerah. Atas dasar latar belakang di atas penulis ingin mengkaji ulang gambaran kemandirian keuangan daerah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2024”

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan alat analisis perangkat perhitungan software SPSS 30. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan Kabupaten/kota yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencakup Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul dan Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah PAD (X1), Dana Perimbangan (X2), sedangkan Variabel terikatnya yaitu Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini secara langsung menggunakan teknik wawancara dan secara tidak langsung menggunakan data-data sekunder yang

berasal Laporan Realisasi Anggaran yang di rilis pada situs Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota di DIY kurun waktu 2019-2024 sehingga di dapatkan total 30 sampel yang memenuhi kriteria.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas serta Uji Regresi Linier Berganda dengan menggunakan Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Simultan (Uji F), Uji Parsial (Uji T).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Wawancara

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu propinsi setingkat daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Propinsi yang terdiri dari 5 Kabupaten/Kota yaitu Kab. Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta, masing-masing memiliki karakteristik wilayah masing-masing dengan potensi kekayaan alam yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai pada BPKAD Kab/Kota dijelaskan bahwa tingkat ketimpangan wilayah di propinsi ini cukup tinggi. Hal ini dapat terlihat dari jumlah

pendapatan asli daerah yang di hasilkan tiap tahun maupun dana transfer dari pusat yang diterima. Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat berada pada rentang menuju kemandirian dan belum mandiri. Hal tersebut menjadi perhatian dari pemangku kepentingan agar tingkat ketimpangan antar wilayah tidak semakin jauh seperti mengoptimalkan sumber-sumber dana yang diterima baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun yang berasal dari luar serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang masih belum tergarap secara optimal.

2. Analisis Statistik Diskriptif

Penelitian ini menggunakan 30 sampel dari lima kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaporkan Laporan Realisasi Anggaran pada situs BPKAD, sampel yang diamati selama 6 tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Dari hasil analisis ini menunjukkan adanya kestabilan rasio kemandirian dan selama selama enam periode terakhir menunjukkan kenaikan yang cenderung baik.

Tabel. Deskriptif Data

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviation
X1_PAD	30	1,06	803,68	0,045	247,6
X2_Dana Perimbangan	30	1,03	989,61	0,0398	437,8
Y_Rasio Keseimbangan	30	0,05	0,37	0,2377	0,098

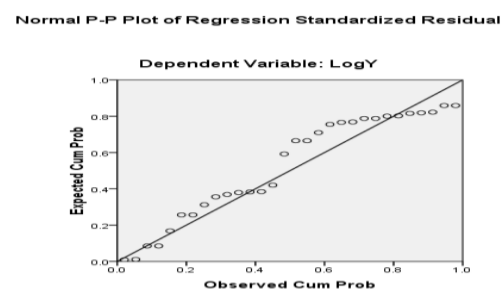
Sumber: data sekunder diolah, 2025

Dari deskripsi di atas menunjukkan bahwa nilai PAD mempunyai nilai minimum 1,06; maksimum 803,68; rata rata 0,045 dan standar deviasi 247,6. Variabel dana perimbangan mempunyai nilai minimum 1,03; maksimum 989,61; rata rata 0,039 dan standar deviasi 437,8 dan variabel Rasio keseimbangan mempunyai nilai minimum 0,05; maksimum 0,37; rata rata 0,2377 dan standar deviasi 0,098.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan Grafik diatas, terlihat titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal, serta mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode uji glejser. Cara dasar pengambilan keputusan uji Glejser yaitu apabila nilai signifikansi lebih

besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Begitu juga sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari olah data pertama menggunakan uji heteroskedastisitas menunjukkan terdapat heteroskedastisitas tetapi setelah data ditransformasikan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel Uji Heterokodestisitas

Coefficients ^a									
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics
	B	Std. Error				Zero-order	Partial	Tolerance	
1 (Constant)	.901	.730		1.235	.227				
logX1_PAD	-.096	.057	-.309	1.671	.106	-.289	-.306	.974	1.027
logX2_DanaPerimbangan	.028	.041	.127	.686	.499	.077	.131	.974	1.027

a. Dependent Variable: ABS_RES_1

Sumber: data sekunder diolah, 2025

Pada uji glejser di atas menunjukkan bahwa, nilai signifikan pada variabel bebas yaitu PAD (X1) adalah $0,106 > 0,05$ dan Dana perimbangan (X2) adalah $0,499 > 0,05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a									
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics
	B	Std. Error				Zero-order	Partial	Tolerance	
1 (Constant)	3.731	1.421		-2.627	.014				
logX1_PAD	.368	.111	.542	3.307	.003	.513	.537	.974	1.027
logX2_DanaPerimbangan	-.088	.081	-.179	-1.095	.283	-.091	-.206	.974	1.027

a. Dependent Variable: LogY

Sumber: data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.3. didapatkan nilai *tolerance* untuk variabel PAD dan Dana Perimbangan masing-masing sebesar 0,974. Nilai tersebut di atas 10% (0,10), sedangkan bila dilihat berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*) masing-masing variabel mempunyai nilai sebesar 1,027 untuk PAD, 1,027 untuk Dana perimbangan. Nilai tersebut juga di bawah nilai ketetapan yaitu kurang dari 10 yang berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi. Sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi rasio kemandirian berdasarkan masukan variabel bebas PAD dan dana perimbangan.

d. Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	Durbin-Watson
1	0,294	2,427

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan table diatas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,427. Angka ini akan dibandingkan dengan DW tabel dengan jumlah sample 30 data, jumlah variabel bebas 2 dan tingkat kepercayaan 5% di dapat nilai batas bawah (dl) = 1,46 dan batas atas (du) = 1,63. Oleh karena nilai DW 2,427, berada di antara batas atas (du) = 1,63 dan (4-du) = 2,37, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Berdasarkan uji asumsi klasik yang sudah diujikan diatas, dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat asumsi klasik, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk memprediksi rasio kemandirian berdasarkan masukan variabel bebas PAD dan Dana Perimbangan.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan analisis regresi berganda dengan program SPSS 30 for Windows diperoleh nilai koefisien parameter (beta), t-value dan sig dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a									
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance VIF
1 (Constant)	-3.731	1.421		-2.627	.014				
logX1_PAD	.368	.111	.542	3.307	.003	.513	.537	.535	.974 1.027
logX2_DanaPerimbangan	-.088	.081	-.179	-1.095	.283	-.091	-.206	-.177	.974 1.027

a. Dependent Variable: LogY

Dari Tabel diatas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = -3,731 + 0,368X_1 - 0,088X_2$$

Persamaan regresi berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 3,731 menunjukkan bahwa dalam keadaan variabel-variabel independen diasumsikan tidak mengalami perubahan (sama dengan nol) maka rasio kemandirian sebesar 3,731.
2. Koefisien regresi sebesar 0,368 pada X_1 menunjukkan bahwa apabila PAD mengalami penurunan sebesar 1 unit maka rasio kemandirian akan mengalami kenaikan sebesar 0,368 di mana variabel independen lainnya dianggap tetap. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa PAD mempunyai pengaruh yang negatif atau berlawanan arah terhadap rasio kemandirian.
3. Koefisien regresi sebesar -0,088 pada X_2 menunjukkan apabila dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 1 unit maka rasio kemandirian akan mengalami penurunan sebesar 0,088 di mana variabel independen lainnya dianggap tetap. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa dana

Sumber: data sekunder diolah, 2025

perimbangan mempunyai pengaruh yang positif atau searah terhadap rasio kemandirian.

a. Uji Statistik F

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel Hasil Uji F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.526	2	.263	5.628	.009 ^a
Residual	1.261	27	.047		
Total	1.786	29			

a. Predictors: (Constant), logX2_DanaPerimbangan, logX1_PAD

b. Dependent Variable: LogY

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan uji Anova, diperoleh nilai F hitung sebesar 5,628 dengan tingkat probabilitas 0,009 (signifikansi). Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan nilai F lebih besar dari 5,52, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi PAD atau dengan kata lain bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Rasio kemandirian.

b. Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.542 ^a	.294	.242	.2160896	2.427

a. Predictors: (Constant), logX2_DanaPerimbangan, logX1_PAD

b. Dependent Variable: LogY

Sumber: data sekunder diolah, 2026

Berdasarkan diatas besarnya nilai *Adjusted R²* adalah 0,294. hal ini berarti 29,4% variasi Rasio kemandirian bisa dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen PAD dan Dana Perimbangan. Sedangkan sisanya 70,6% (100% - 29,4%) dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain di luar model regresi.

c. Uji Hipotesis secara parsial (Uji t)

Hasil Uji Hipotesis secara parsial (Uji t) dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (uji t)

No	Variabel	Sig	Keterangan	Ho
1	PAD	0,003	sig < 0,05	Ditolak
2.	Dana Perimbangan	0,283	Sig>0,05	Diterima

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan table uji t diatas diperoleh nilai sig (P-Value) untuk variabel PAD sebesar 0,003 di bawah tingkat signifikansi 5% maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable rasio kemandirian. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan berhasil didukung.

Variabel Dana Perimbangan mempunyai nilai sig (P-value) sebesar 0,283 di atas tingkat signifikansi 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel dana perimbangan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap variable Rasio kemandirian. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan terbukti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis data penelitian diatas menunjukkan:

1. Adanya pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di DIY dari Tahun 2019-2024.
2. Tidak Adanya pengaruh yang signifikan antara Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di DIY dari Tahun 2019-2024.
3. Secara Simultan adanya pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di DIY dari Tahun 2019-2024.

Saran

Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah agar mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan

membuka pendanaan/investasi produktif pada daerah yang bersangkutan sehingga potensi pendapatan asli daerah yang akan diserap suatu daerah menjadi lebih optimal.

2. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak ada pengaruh antara Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan menambah periode penelitian atau menambah variabel pendukung lainnya seperti belanja modal, belanja pegawai atau dana keistimewaan.
4. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel dalam menentukan kemandirian keuangan pemerintah daerah serta data yang digunakan bersifat sekunder (hasil olahan pihak tertentu) sehingga terdapat potensi data yang diperoleh bukan merupakan data yang sebenarnya. Oleh sebab itu, akan sangat baik jika pada penelitian berikutnya melibatkan data yang bersifat primer seperti hasil observasi dan wawancara langsung sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat. Selain itu, penambahan jumlah sampel atau penambahan variabel independen diharapkan dapat menunjang hasil penelitian

yang lebih representative dan dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah 2020. https://www.bpk.go.id/assets/files/lkp/2020/lkpp_2020_1624341245.pdf

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Portal Data SIKD. Tersedia: www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Gaghana, R. L., P. Kindangen, dan D. C. Rotinsulu. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon Dan Kota Kotamobagu) Ramona. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah 19(5): 1–18.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Harefa, M. (2018). Hubungan Dana Bagi Hasil Dengan Penerimaan Daerah

Dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 9(2): 147–160

Indrijawati, A. (2024). Literature Review : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Corresponding Author : Aini Indrijawati 1 Corresponding Author : Aini Indrijawati 2. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP), 9, 1–6. <https://journal.uho.ac.id/index.php/jpep>.

Lutfi M, Wahyuni, Hamris S. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Pada Laporan Keuangan (2016-2022). (2025). *Ecometri: Jurnal Studi Ekonomi Dan Manajemen Terapan*, 1(2), 61-77. <https://ejournal.polindo.ac.id/index.php/ecometri/article/view/15>

Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016- 2020. JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi), 14(1), 11-20.

Rosidan, Izam (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah di Barlingmascakeb 2009-2017*. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

- Sarwono, J. (2022).Metodologi Penelitian Kuantitatif Menggunakan SPSS.Gava Media:Yogyakarta
- Sugiyono.2022.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta: Bandung
- Suwarno, Syamsul Huda & Zumrotul Fitriyah.2017.Kemandirian Keuangan Daerah.Mitra Sumber Rejeki : Surabaya
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.